



TAHAP AWAL LAYANI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Si JAK, Dekatkan Pelayanan bagi Wajib Pajak

YOGYA (KR) - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya menggulirkan program unggulan atau quick win berupa armada 'Si JAK' atau Siap Jemput Pelayanan Pajak Daerah. Program percepatan 100 hari kerja Hasto-Wawan tersebut terbukti mampu mendekatkan pelayanan bagi wajib pajak.

Armada Si JAK resmi diluncurkan pada Jumat (9/5) kemarin usai memberikan pelayanan perdana di Kantor Kelurahan Sorosutan Kemantren Umbulharjo. Tahap awal Si JAK melayani perpajakan untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bukan hanya sekadar pembayaran PBB, melalui Si JAK wajib pajak juga bisa melakukan berbagai konsultasi, pembetulan, permohonan mutasi, verifikasi dan lain sebagainya.

Program itu pun mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satunya Tri Sunarni, yang tidak perlu lagi jauh-jauh ke Balai kota atau mencari loket perbankan untuk memba-

yarkan PBB. Dirinya yang sudah berusia di atas 60 tahun mengaku hanya bisa membayar PBB secara tunai. "Alhamdulillah kalau begini jadi dekat. Bisa datang sendiri, tanpa harus merepotkan saudara untuk mengantarkan," katanya sembari menyampaikan, setiap tahun dirinya selalu membayar PBB tanpa menunggu jatuh tempo.

Kepala BPKAD Kota Yogya RR Andarini, menjelaskan dipilihnya Kelurahan Sorosutan sebagai lokasi peluncuran Si JAK lantaran adanya pemekaran di RW 17 dan RW 18. "Dengan adanya pemekaran wilayah tentunya juga menyebabkan perubahan data wajib pajak. Demi tertibnya

administrasi perpajakan, perubahan data wajib pajak bisa kami layani melalui armada Si JAK ini," jelasnya.

Oleh karena itu, Si JAK tak ubahnya seperti mobil pajak daerah keliling yang mampu menjangkau atau jemput bola hingga di tiap wilayah. Sebelum secara resmi diluncurkan, Si JAK sudah diujicoba dalam memberikan pelayanan di wilayah. Antusias masyarakat pun cukup tinggi lantaran ratusan wajib pajak mampu terlayani hanya dalam tempo dua jam. Ke depan, setiap Kamis armada Si JAK sudah dijadwalkan jemput bola ke wilayah hingga awal Desember mendatang.

Kepala Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKAD Kota Yogya RM Kisbiyantoro, menambahkan meski sudah ada penjadwalan namun pihaknya tetap membuka pengajuan masyarakat yang hendak dilayani melalui Si JAK. Dengan catatan, minimal 20 wajib pajak PBB sudah dikoordinir untuk dilayani di tempat yang sudah disepakati oleh wilayah. "Ketika kami menerjunkan Si JAK ini, perbankan maupun PT Pos yang menjadi mitra kas daerah juga kami libatkan. Sehingga ketika wajib pajak membayar PBBnya maka langsung masuk ke kas daerah. Begitu pula petugas kami yang akan melayani semua jenis permohonan yang menyangkut administratif. Bahkan jika permohonan yang diajukan ternyata membutuhkan kajian lanjutan, wajib pajak pun tidak perlu

PBB dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp 2 miliar. Hal ini karena yang NJOP di atas Rp 2 miliar seperti kalangan perhotelan dan usaha lainnya sudah dilayani melalui sistem elektronik atau e-SPPPT. Ke depan pihaknya tidak menutup kemungkinan akan mengembangkan layanan Si JAK hingga jenis pajak daerah lainnya.

Kisbiyantoro menjelaskan, Si JAK memiliki keunggulan dibanding sistem layanan jemput bola lainnya. Seperti pekan panutan pembayaran pajak maupun loket mobile dari perbankan yang hanya melayani pembayaran pajak saja. Tetapi melalui Si JAK, selain pembayaran juga mampu memanfaatkan layanan digital dalam pembayaran pajak daerah. Inovasi berupa Kopi QRIS-NA yang diluncurkan tahun lalu ternyata baru diakses oleh 30 persen wajib



KRendi Wahdan

Warga Sorosutan memanfaatkan armada Si JAK untuk mengakses layanan PBB.

mendatangi Balai kota. Tugas BPKAD yang nantinya akan menindaklanjuti di kantor.

Kendati demikian, dirinya berharap masyarakat terutama wajib pajak PBB mampu memanfaatkan layanan digital dalam pembayaran pajak daerah. Inovasi berupa Kopi QRIS-NA yang diluncurkan tahun lalu ternyata baru diakses oleh 30 persen wajib

pajak PBB. "Selain ini masih banyak yang memilih pembayaran langsung. Bisa dilihat kalau sudah mendekati jatuh tempo, antrian loket di Mal Pelayanan Publik (MPP) bahkan bisa meluap sampai luar ruangan. Semoga dengan kehadiran Si JAK ini memudahkan wajib pajak karena pelayanannya dekat dengan tempat tinggalnya," urainya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005